

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas Berkah dan Rahmat-Nya, Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kominfo Kabupaten Blitar Tahun 2025 yang akan digunakan sebagai pedoman Dinas Kominfo untuk merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2025 dalam mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran perangkat daerah dan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Penyusunan Renja adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang secara teknis penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tahun 2025 merupakan tahun kedua dalam Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2025. Rencana kerja ini menyajikan tujuan dan sasaran beserta program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas dan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Blitar pada tahun 2025. Renja 2025 disusun berdasarkan target kinerja Pemerintah Daerah tahun 2025 dan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024. Usulan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kominfo disusun sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 tahun 2021.

Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih belum sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Renja sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmatNya kepada kita semua.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

KABUPATEN BLITAR



HERMAN WIDODO, SH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650916 199112 001



RENJA

Dinas Kominfo Kabupaten Blitar Tahun 2025

DAFTAR ISI

Contents	
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Renja - OPD	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022	14
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022 dan Capaian Renstra PD ..	14
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	33
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	57
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	60
2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	68
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD	70
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional	70
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	73
3.3 Program dan Kegiatan	Error! Bookmark not defined.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	96
BAB V PENUTUP	99



DAFTAR TABEL

Table 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2022	15
Table 2 Cross cutting sasaran strategis dan Mapping Indikator	Error! Bookmark not defined.
Table 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Blitar.....	52
Table 4 Reviu Rencana Kerja RKPD 2023 Dinas Kominfo.....	62
Table 5 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	68
Table 6 Persentase Capaian IKU Dinas Kominfo.	Error! Bookmark not defined.
Table 7 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kominfo Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024.....	81
Table 8 Rencana Aksi dan Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Kominfo Tahun 2023	96



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan. Penyusunan dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Peraturan ini adalah petunjuk pelaksanaan dan teknis dari Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan waktu dan substansinya. Rencana pembangunan ini juga dibedakan menurut jenjang, yaitu tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah. Dokumen perencanaan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Sedangkan, perangkat daerah memiliki kewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk waktu 5 tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk waktu 1 tahun. Kedua dokumen menjadi dokumen resmi yang harus disusun dan digunakan

Dokumen Rencana Kerja (Renja) PD memiliki 2 fungsi sekaligus, yaitu untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan teknis dan sebagai pedoman bagi seluruh kepala bidang dalam mengeluarkan anggaran (DPA) dan sekaligus untuk menyusun laporan pertanggungjaaban pengeluaran dana. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang di dalam renja harus bersumber dari yang sudah tertuang di dalam Rencana Strategis PD. Renja harus disusun dengan berpedoman pada dokumen rencana strategis perangkat daerah. Perubahan dapat dilakukan pada nilai pagu sub kegiatan, dengan mempertimbangkan kebutuhan realisasi biaya dan persetujuan tim anggaran pemerintah daerah.

Sedangkan, untuk indikator kinerja harus sinkron dengan indikator kinerja di dalam dokumen rencana strategis.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Selanjutnya Kepala PD menetapkan Renja PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada tahun anggaran berkenaan yang pada akhirnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan R-APBD PD yang bersangkutan. Renja PD disusun beriringan dengan rancangan awal RKPD.

Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Dinas Kominfo) Tahun 2025 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kominfo Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar (RKPD) Tahun 2025. Program, kegiatan dan sub kegiatan dijabarkan dalam matriks yang meliputi program, kegiatan, dan sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif dan sumber dana. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Dinas Kominfo Tahun 2025 merupakan:

1. Pedoman bagi Dinas Kominfo dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2025.
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah



- dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik –Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 10/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 18 Seri E);
21. Peraturan Bupati Blitar Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 119/D);
22. Peraturan Bupati Blitar Nomor 92 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 92/E);.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan rencana kerja Dinas Kominfo dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan perangkat daerah dalam pembangunan daerah. Penyusunan Renja tahun 2025 dipergunakan pula untuk mensinergikan ulang kesenjangan yang terjadi setelah dilakukannya evaluasi atas pelaksanaan renja PD di tahun 2024 serta sebagai tolok ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2025. Adapun tujuan disusunnya Renja tahun 2025 adalah untuk:



1. Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Kominfo tahun 2021-2026 dalam rencana tahunan yaitu tahun 2025;
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan PD serta merancang kebijakan dan strategi percepatan pembangunan sesuai dengan perubahan kondisi terkini.
4. Sebagai dasar acuan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi.
5. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan OPD yang perlu disampaikan kepada pemerintah daerah.

1.4 Sistematika Renja - OPD

Secara garis besar, sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.



1.4. Sistematika Penulisan

Memuat pokok bahasan dalam penulisan Renja PD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kominfo tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, dan realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan/atau realisasi APBD untuk PD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

- Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD; dan
- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Capaian Renstra PD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji,

disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas, pokok dan fungsi serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Berisikan uraian mengenai :

- Se jauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
- Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD dan
- Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan.
2. Penjelasan mengenai proses alasan tersebut dilakukan.
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional.

Telaah terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaah yang menyangkut arah, kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misal:
 - Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 - Pencapaian SDGs,
 - Pengentasan kemiskinan,
 - Pencapaian SPM,
 - Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 - Pengembangan daerah terisolir, Dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu)
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaanya
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program sebagai berikut:

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian penjabaran dari Tabel Rencana Program dan Kegiatan.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD

Untuk menetapkan perencanaan pembangunan tahun 2025 diperlukan Evaluasi hasil capaian Renja tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan realisasi APBD.

Tahun 2025 dalam periode Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah merupakan tahun keempat pada periode renstra 2021-2026. Nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pada tahun 2025 pedoman nomenklatur dan indikator dengan menggunakan permendagri nomor 050-5889 tahun 2021.

Selain itu pada tahun 2025 juga dilakukan beberapa penyesuaian, penyesuaian yang dilakukan diantaranya :

1. Melakukan pemetaan awal program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kepmendagri nomor 050-5889 tahun 2021.
2. Melakukan pengukuran evaluasi capaian kinerja sehingga diketahui persentase tercapainya kinerja pada periode transisi.
3. Menyesuaikan target indikator kinerja disesuaikan dengan perhitungan menggunakan indikator kepmendagri nomor 050-5889 tahun 2021.

Urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar pada semester I tahun 2024 dilaksanakan melalui 5 Program, 12 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.558.599.626,00 (Enam belas miliar lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.822.141.587,00 (Enam miliar delapan ratus dua puluh dua juta lima seratus empat puluh satu ribu ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau sebesar (41,20%). Serapan ini masih tergolong rendah untuk semester I karena masih di bawah 50%.

Berikut tabel hasil evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD sampai dengan semester I Tahun 2024.

Table 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Semester I Tahun 2024

no	Sasaran	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Out come)/ Kegiatan(Ou tput)/ Sub Kegiatan(Ou tput)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+ 11		13=(12/7)*100 %		14=6+12		15= 13/5 *100 (Ki & Kr) Rp= 14		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp
	Menin gkatny a akunt abilita s kinerj a perang kat daerah	Program Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah Kabupate n/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah	98%	1.683.40 5.477.50 0	92%	4.369. 145.8 57	94%	5.05 9.31 8.57 6	17, 12	859 .87 6.4 57	56,64	2.8 44. 140 .57 9	56,64	2.84 4.14 0.57 9	56,64	406.30 5.797	56,64	7.21 3.28 6.43 6	113 2,8	113 2,8	7.2 13. 286 .43 6

		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	92%	500.000.000	92%	70.370.000	94%	111.141.225	6,05	2.359.000	47,6	18.561.800	47,6	18.561.800	47,6	2.651.686	47,6	88.931.800	952	952	88.931.800
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Renja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	15	2.000.000	3	43.500.000	3	23.268.126	14,96	2.359.000	47,93	7.559.000	47,93	7.559.000	47,93	1.079.857	47,93	51.059.000	958,6	958,6	51.059.000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	3.000.000	4	26.870.000	4	87.873.099	0	0	47,38	11.002.800	47,38	11.002.800	47,38	1.571.829	47,38	37.872.800	947,6	947,6	37.872.800

		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Akuntabel		92	14.230.206.070	92	3.091.750.651	94%	3.313.635.643	20,6	681.022.351	62,06	2.051.060.428	62,06	2.051.060.428	62,06	293.008.633	62,06	5.142.811.079	1241,2	1241,2	5.142.811.079
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangan	35	14.080.406.670	27	3.037.962.651	28	3.278.205.518	20,87	679.969.351	62,73	2.043.777.428	62,73	2.043.777.428	62,73	291.968.204	62,73	5.081.740.079	1254,6	1254,6	5.081.740.079
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	35	137.200.000	1	45.120.000	1	29.500.000	0	0	15,15	6.230.000	15,15	6.230.000	15,15	890.000	15,15	51.350.000	303	303	51.350.000

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10	6.599.700	7	8.668.000	7	5.930.125	17,76	1.053.000	17,76	1.053.000	17,76	1.053.000	17,76	150.429	17,76	9.721.000	355,2	355,2	9.721.000
		Kegiatan Administrasi Umum	Persentase Administrasi Umum yang Dilaksanakan Secara Akuntabel	98%	1292939980	92	374.871.386	94%	398.331.475	5,74	21.612.250	57,62	217.092.491	57,62	217.092.491	57,62	31.013.213	57,62	591.963.877	1152,4	1152,4	591.963.877
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan yang disediakan	10	52329000	10	11.085.500	4	2.776.660	0	0	96,91	2.261.000	96,91	2.261.000	96,91	323.000	96,91	13.346.500	1938,2	1938,2	13.346.500

		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	14	451730475	14	36.643.801	3	20.451.328	0	0	84,7	20.071.500	84,7	20.071.500	84,7	2.867.357	84,7	56.715.301	1694	1694	56.715.301
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8	123603760	6	25.292.085	8	36.477.895	0	0	91,18	35.562.500	91,18	35.562.500	91,18	5.080.357	91,18	60.854.585	1823,6	1823,6	60.854.585
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1705	7513000	1	5.000.000	1	1.750.000	14,74	258.000	43,89	768.000	43,89	768.000	43,89	109.714	43,89	5.768.000	877,8	877,8	5.768.000

		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	6	298668745	6	121.850.000	2	134.821.000	9,01	12.141.000	39,47	53.211.000	39,47	53.211.000	39,47	7.601.571	39,47	175.061.000	789,4	789,4	175.061.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD	398	359095000	1	175.000.000	1	202.054.592	5,26	9.213.250	59,88	104.788.491	59,88	104.788.491	59,88	14.969.784	59,88	279.788.491	1197,6	1197,6	279.788.491
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	98	1305908725	92	151.010.000	94%	15.000.000	0	0	35,23	5.285.000	35,23	5.285.000	35,23	755.000	35,23	156.295.000	704,6	704,6	156.295.000

		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal	291	291000000	27	151.010.000	28	15.000.000	0	0	35,23	5.285.000	35,23	5.285.000	35,23	755.000	35,23	156.295.000	704,6	704,6	156.295.000
		Sosialisasi Peraturan perundangan.	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundangan	1525	1014908725	3	26.870.000	0		0	0					0	0	0	26.870.000	0	0	26.870.000
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	98	1019996345	92	273.625.900	94%	146.079.774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273.625.900	0	0	273.625.900

		Pengadaa n Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	70	1019996 345	14	212.1 97.00 0	14	146. 079. 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212. 197. 000	0	0	212 .19 7.0 00
		<i>Kegiatan Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah</i>	<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu</i>	98	8954723 69	92	195.3 20.92 0	94%	863. 736. 458	14, 2	124 .64 0.1 66	50,12	439 .93 0.4 70	50,12	439. 930. 470	50,12	62.847 .210	50,12	635. 251. 390	100 2,4	100 2,4	635 .25 1.3 90
		Penyediaa n Jasa Surat Menyurat	Jumlah waktu penyediaan jasa surat- menyurat	12	2000026 9	1	4.000. 000	1	4.16 2.50 0	99. 94	4.1 60. 000	99,94	4.1 60. 000	99,94	4.16 0.00 0	99,94	594.28 6	99,94	8.16 0.00 0	199 8,8	199 8,8	8.1 60. 000

		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12	34000000	1	1.500.000	1	1.310.000	1,16	76.098	2,79	182.562	2,79	182.562	2,79	26.080	2,79	1.682.562	55,8	55,8	1.682.562
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12	841472100	1	189.820.920	1	858.263.958	0,6034722	120.404.068	50,23	435.587.908	50,23	435.587.908	50,23	62.226.844	50,23	625.408.828	1004,6	1004,6	625.408.828
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	98	700947223	92	273.625.900	94%	211.394.001	14,29	30.242.690	53,01	112.210.390	53,01	112.210.390	53,01	16.030.056	53,01	385.836.290	1060,2	1060,2	385.836.290

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah waktu penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	12	444947223	15	141.700.000	15	147.365.500	20,48	302.424.690	49,94	73.148.190	49,94	73.148.190	49,94	10.449.741	49,94	214.848.190	998,8	998,8	214.848.190
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	1	256000000	1	131.925.900	1	64.028.501	0	0	61,01	39.062.200	61,01	39.062.200	61,01	5.580.314	61,01	170.988.100	1220,2	1220,2	170.988.100

		PROGRA M INFORMA SI DAN KOMUNI KASI PUBLIK	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap akses informasi (Hasil Survey IKM)	90	1332527 9888	86	2.572. 011.5 46	86	4.96 2.49 5.97 2	4,9 7	216 .11 9.8 97	32	1.4 11. 590 .11 6	32	1.41 1.59 0.11 6	32,49	201.65 5.731	32,49	3.98 3.60 1.66 2	649 ,8	649 ,8	3.9 83. 601 .66 2
		<i>Kegiatan Pengelola an Informasi dan Komunika si Publik Pemerinta h Daerah Kabupate n/ Kota</i>	<i>Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan STRAKOM</i>	90	1332527 9888	60	2.572. 011.5 46	60	4.96 2.49 5.97 2	4,9 7	216 .11 9.8 97	32	1.4 11. 590 .11 6	32	1.41 1.59 0.11 6	32,49	201.65 5.731	32,49	3.98 3.60 1.66 2	649 ,8	649 ,8	3.9 83. 601 .66 2
		Pengelola an Media Komunika si Publik	Diseminasi informasi di media intern	12	1122047 9888	1	1.663. 499.3 74	1	3.30 2.38 0.44 3	2,6 3	86. 665 .00 0	31,46	1.0 38. 569 .79 0	31,46	1.03 8.56 9.79 0	31,46	148.36 7.113	31,46	2.70 2.06 9.16 4	629 ,2	629 ,2	2.7 02. 069 .16 4
		Pelayanan Informasi Publik	Pembinaan PPID pembantu	54	8223000 00	1	506.0 26.15 0	1	921. 392. 080	15, 36	46. 819 .70 0	38,96	118 .74 5.7 00	38,96	118. 745. 700	38,96	16.963 .671	38,96	624. 771. 850	779 ,2	779 ,2	624 .77 1.8 50

		Monitorin g Opini dan Aspirasi Publik	Hasil survey kepuasan masyarakat	9	1282500 000	2	402.4 86.02 2	1	738. 723. 449	11, 19	82. 635 .19 7	34,42	254 .27 4.6 26	34,42	254. 274. 626	34,42	36.324 .947	34,42	656. 760. 648	688 ,4	688 ,4	656 .76 0.6 48
		PROGRA M APLIKASI INFORMA TIKA	Persentase Layanan Publik yang diselenggara kan secara online dan terintegrasi	9000%	3028507 1127	50	4.764. 000.0 00	50	5.51 9.34 3.65 9	13	676 .16 7.7 03	44,23	2.2 16. 083 .19 5	44,23	2.21 6.08 3.19 5	44,23	316.58 3.314	44,23	6.98 0.08 3.19 5	884 ,6	884 ,6	6.9 80. 083 .19 5
			Persentase Perangkat Daerah yang Terlayani Infrastrukt ur TIK	100%		3	26.87 0.000	100	5.51 9.34 3.65 9	13	676 .16 7.7 03	44,23	2.2 16. 083 .19 5	44,23	2.21 6.08 3.19 5	44,23	316.58 3.314	44,23	2.24 2.95 3.19 5	884 ,6	884 ,6	2.2 42. 953 .19 5

		Kegiatan Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo	155	31785133562	100	4.127.500.000	154	4.366.619.40	13,24	572.044.000	47,93	2.070.366.000	47,93	2.070.366.000	47,93	295.766.571	47,93	6.197.866.000	958,6	958,6	6.197.866.000
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi jaringan backbone	54	31785133562	3	26.870.000	154	4.366.619.40	13,24	572.044.000	47,93	2.070.366.000	47,93	2.070.366.000	47,93	295.766.571	47,93	2.097.236.000	958,6	958,6	2.097.236.000

		<i>Kegiatan Pengelolaan e-governme nt di lingkup pemerinta h daerah kabupate n/kota</i>	<i>Jumlah regulasi/kebi jakan TIK terkait implementasi e-government</i>	23	4444365 624	3	26.87 0.000	23	1.15 2.72 4.25	15, 05	104 .12 3.7 03	21,07	145 .71 7.1 95	21,07	145. 717. 195	21,07	20.816 .742	21,07	172. 587. 195	421 ,4	421 ,4	172 .58 7.1 95
		Pengemba ngan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerinta h Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi Pemerintah Daerah Yang Dibangun	20	2316907 927	52	214.5 84.38 4	52	364. 190. 800	32, 33	96. 018 .50 0	40,12	119 .14 5.1 30	40,12	119. 145. 130	40,12	17.020 .733	40,12	333. 729. 514	802 ,4	802 ,4	333 .72 9.5 14
		Pengemba ngan dan Pengelola an Ekosistem Kabupate n/Kota Cerdas	Jumlah dokumen monitoring smart city	5	6554296 59	1	113.2 53.82 8	1	381. 051. 099	1,9 4	2.3 55. 000	7,45	9.0 67. 547	7,45	9.06 7.54 7	7,45	1.295. 364	7,45	122. 321. 375	149	149	122 .32 1.3 75

		Monitorin g Evaluasi dan Pelaporan Pengemba ngan Ekosistem SPBE	Jumlah laporan hsil monitoring dan evaluasi internal SPBE	5	9442381 28	1	71.04 2.788	1	116. 242. 091	2,7 2	2.2 82. 203	6,38	7.7 10. 518	6,38	7.71 0.51 8	6,38	1.101. 503	6,38	78.7 53.3 06	127 ,6	127 ,6	78. 753 .30 6
		Pengemba ngan dan Pengelola an Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunika si Daerah	Jumlah Workshop TIK	15	8270661 28	3	26.87 0.000	1	95.3 51.9 02	0	0	5,08	2.4 20. 000	5,08	2.42 0.00 0	5,08	345.71 4	5,08	29.2 90.0 00	101 ,6	101 ,6	29. 290 .00 0

		PROGRA M PENYELE NGGARA AN STATISTI K SEKTOR AL	Persentase Perangkat Daerah yang menggunaka n data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembanguna n daerah	90%	3600000 000	70%	871.5 14.84 8	70%	745. 754. 832	1,7 5	13. 079 .65 9	43,49	325 .21 7.8 39	43,49	325. 217. 839	43,49	46.459 .691	43,49	1.19 6.73 2.68 7	869 ,8	869 ,8	1.1 96. 732 .68 7
		<i>Kegiatan Penyeleng garaan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kab/ Kota</i>	<i>Jumlah perangkat daerah yang menggunaka n data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembanguna n daerah</i>	52	3600000 000	52	871.5 14.84 8	52	745. 754. 832	1,7 5	13. 079 .65 9	43,49	325 .21 7.8 39	43,49	325. 217. 839	43,49	46.459 .691	43,49	1.19 6.73 2.68 7	869 ,8	869 ,8	1.1 96. 732 .68 7

		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Database Statistik Sektoral	52	1150000000	4	489.031.348	5	561.029.012	1,78	9.893.169	57,36	318.815.349	57,36	318.815.349	57,36	45.545.050	57,36	807.846.697	1147,2	1147,2	807.846.697
		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Design Arsitektur Data	1	2450000000	1	382.483.500	1	184.725.820	1,65	3.176.490	3,32	6.366.490	3,32	6.366.490	3,32	909.499	3,32	388.849.990	66,4	66,4	388.849.990
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMATAN INFORMASI	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100	58970413	70	98.709.400	100%	271.686.589	0	0	7,82	25.109.858	7,82	25.109.858	7,82	3.587.123	7,82	123.819.258	156,4	156,4	123.819.258

		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip aplikasi persandian	85%	58970413	70	98.709.400	70	271.686.589	0	0	7,82	25.109.858	7,82	25.109.858	7,82	3.587.123	7,82	123.819.258	156,4	156,4	123.819.258
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah aplikasi persandian yang digunakan dalam penyelenggaraan SPBE	20	58970413	1	98.709.400	1	271.686.589	0	0	7,82	25.109.858	7,82	25.109.858	7,82	3.587.123	7,82	123.819.258	156,4	156,4	123.819.258

Dalam hal capaian kinerja kegiatan seperti yang terdapat dalam tabel diatas pada tahun 2022 masih tercapai rata-rata 41% dari target yang telah ditetapkan, karena tahun 2022 merupakan awal tahun dari renstra periode 2022-2026 maka masih belum terpenuhi 1 periode renja hanya 1 semester renja 2022 dan juga adanya pergeseran kegiatan DBHCHT ke Satpol PP sebelum evaluasi semester 1 berlangsung. Sedangkan, untuk capaian tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 47,44% dari target yang ditetapkan. Pencapaian target tahun 2023 adalah masa

recovery (pemulihan) dan capaian kinerja awal tahun ke-2 dari renstra periode 2022-2026 maka baru terpenuhi kinerja 1,5 periode renja dimana realisasi 2022 dan triwulan ke-2 Tahun Anggaran 2023 serta masih adanya rasionalisasi anggaran dari Pemerintah Pusat di tahun 2023. Capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan oleh bidanng-bidang sudah banyak yang melebihi target yang ditetapkan dalam renstra dan renja 2023, sehingga dapat terus ditingkatkan capaiannya.

Atas hasil pencapaian kinerja program dan kegiatan tersebut masing-masing memberikan kontribusi pada pencapaian kinerja sasaran OPD sesuai dengan cross cutting sasaran strategis. Untuk tahun 2022 dan 2023 sendiri sudah dilakukan mapping indikator seperti yang tersaji dalam tabel berikut

Table 2 Cross cutting sasaran strategis dan Mapping Indikator

No	Kepmen 050-5889 Tahun 2020 (Ranwal Renja)					Kepmen 050-5889 Tahun 2021					GIVEN SIPD	
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Given SIPD	Target
					Tahun 2022					Tahun 2023		Tahun 2023
					Target					Target		Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota			Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	92%	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota			Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan	94%		

									pemerintah daerah			
		1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	8 dokumen		1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	94%		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	3 dokumen			"Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah"	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	4 dokumen			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen		
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah jenis layanan administrasi keuangan yang disediakanJumlah	4 dokumen		2. Administrasi Keuangan Perangkat		Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat	94 %		

				Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu			at Daerah		Daerah yang tepat waktu dan akuntabel			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	27 orang			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 orang/bulan		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas	27 orang			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran OPD	5 dokumen 2 dokumen			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	7 dokumen		

		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian	30 orang		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	94 %		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	0 Orang			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 orang		
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan	270 orang							
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	100 %		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 jenis			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 paket		

								gan Bangun an Kantor	yang Disediakan			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	14 jenis			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 paket		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	6 jenis			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 eksemplar			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	341 eksemplar			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen		

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	98 kali			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan		
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	14 jenis bulan		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tepat sasaran	94 %		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarpras pendukung gedung kantor atau bangunan lainya yang diadakan	14 set			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14 unit		

		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	94 %		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan		

		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	94 %		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah waktu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	12 bulan			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah perlengkapan rumah jabatan /dinas yang mendapat pemeliharaan	1 jenis			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	1 unit		

			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
	2. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap akses informasi (Hasil Survey IKM)	80%	2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap akses informasi (Hasil Survey IKM)	88%		
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah layanan informasi	300 berita		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah layanan Informasi	300 berita		
			Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Survey tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi dan akses	2 kali			Monitoring Opini dan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring	2 dokumen		

				informasi				Aspirasi Publik	Opini dan Aspirasi Publik			
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah cakupan informasi yang didesiminasikan melalui media pemerintah dan non pemerintah	100 %			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 dokumen		
			Pelayanan Informasi Publik	Cakupan pelayanan permohonan informasi publik sesuai UU no 14 tahun 2008	100%			Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Berita Acara		
	3. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	30%	3. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	70%		
				Persentase Perangkat Daerah yang terlayani infrastruktur TIK	100%				Persentase Perangkat Daerah yang Terlayani Infrastruktur TIK	100%		

		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	52 OPD		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%			
			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi jaringan backbone pemkab blitar	52 OPD			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	154 unit		
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah		Jumlah peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi egovernment	2 kebijakan		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah	Jumlah regulasi/kebijakan TIK terkait implementasi e-government	19 kebijakan			

		Kabupaten /Kota					Kabupat en/Kota					
			Pengemban ngan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerinta han Berbasis Elektronik	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	52 OPD			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 unit		
			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	jumlah dokumen monitoring smart city	4 laporan			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	52 Unit		
				Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smartcity	52 OPD			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart	1 dokumen		

								a Cerdas dan Kota Cerdas	City			
			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan dinas Kominfo	1 orang			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 dokumen		
				Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web sesuai standar	52 OPD			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 dokumen		

			Monitorin g, Evaluasi dan Pelaporan Pengemba ngan Ekosistem SPBE	jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi internal SPBE	1 laporan							
	3. PROGRAM PENYELEN GGARAAN STATISTIK SEKTORAL			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	50%	3. PROGRA M PENYEL ENGGAR AAN STATIST IK SEKTOR AL			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	80%		
		Penyelengg araan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota		Jumlah survey statistik sektoral dan kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	2 kali		Penyelen ggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupat en/Kota		Jumlah survey statistik sektoral dan kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	2 kali		

			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Kompilasi statistik sektoral yang dilakukan dan mendapat rekomendasi BPS	4 dokumen			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 dokumen		
				Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai jenis siklus datanya	52 OPD							
			Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah kelengkapan metadata indikator sektoral	1 dokumen			Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 dokumen		
				Jumlah kelengkapan metadata statistik sektora	1 dokumen							
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK			Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN			Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100%		

	PENGAMANAN INFORMASI					PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota		Jumlah Sistem Elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian	100%		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota		jumlah sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian	75 %		
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Presentase sistem elektronik (aplikasi) yang telah menerapkan prinsip aplikasi persandian	60 %			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 laporan		

								Non Elektro nik				
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik di Kabupaten Blitar. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi:

- a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik serta tugas pembantuan lainnya;
- b. penyusunan rencana program dan anggaran di Dinas Kominfo;
- c. penyusunan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, data dan statistik;
- d. melaksanakan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, data dan statistik;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Kominfo.

Dalam melaksanakan pelayanan didukung oleh ketersediaan sumber daya aparatur sejumlah keseluruhan 24 (dua puluh empat) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga kontrak berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang. Selain didukung oleh sumber daya aparatur, dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Kominfo juga didukung oleh adanya sarana dan prasarana serta anggaran yang tersedia. Untuk pelaksanaan kegiatannya Dinas Kominfo bekerja sama juga dengan RTIK dan LPPL Persada. Kedua organisasi ini dibawah binaan Dinas Kominfo yang sebagai tugasnya untuk membantu Dinas Kominfo dalam penyebaran informasi ke masyarakat dan juga untuk membantu dalam bimbingan teknis untuk peningkatan sumber daya manusia agar pemanfaatan teknologi tidak sia sia.

Dengan adanya perkembangan dibidang teknologi informasi maka diharapkan ketersediaan dan keakuratan data yang dihasilkan atau disajikan dapat digunakan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam rangka

peningkatan kualitas pengelolaan layanan publik berbasis elektronik. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat dilihat pada tabel 3 terlampir :

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel 3 terlampir :

Table 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Blitar

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan
				2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2026	
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB		A	
2	Nilai Tata Kelola SPBE			4,22	4,25	4,27	4,30	2,60	2,30	3,60	-	4,32	
3	Nilai Layanan SPBE			4,28	4,29	4,30	4,32	3,20	3,51	4,07	-	4,34	

Dari tabel di atas dapat diketahui Capaian Kinerja pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Blitar untuk IKU belum sesuai target yang telah ditetapkan pada dokumen Renstra Dinas Kominfo karena berbagai hal, yaitu adanya masa transisi perubahan IKU mengikuti RPJMD 2021-2026 pada tahun 2022 dan adanya perubahan paramater indikator penilaian terhadap Nilai Tata Kelola SPBE dan Nilai Layanan SPBE dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Perubahan paramater ini berupa tambahan dan perubahan bobot indikator, dampaknya nilai Indeks SPBE rata-rata seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia mengalami penurunan. Maka, berdasar hasil rapat internal disepakati untuk melakukan penurunan target IKU menjadi diantara 3-3,1. Perubahan target ini sebagai respon terhadap perubahan peraturan dalam penilaian SPBE oleh Kementerian Kominfo.

Nilai indeks SPBE Kabupaten Blitar pada tahun 2018 sebesar 2,14 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 2,9, atau lebih tinggi dibanding rata-rata Nilai Indeks SPBE Nasional sebesar 2,18. Adapun pada tahun 2020 berdasarkan surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor: B/386/M.KT.03/2020 perihal Pelaksanaan Evaluasi SPBE Tahun 2020, Kabupaten Blitar tidak termasuk di dalam 130 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang diambil sebagai sampling evaluasi SPBE. Pada tahun 2021 terdapat penambahan indikator dari 37 menjadi 47 indikator dalam penilaian SPBE, sehingga berdampak terhadap capaian nilai Indeks SPBE sebesar 2,76 atau masuk kategori "Baik". Adapun Tahun 2022 Indeks SPBE Kabupaten Blitar kembali turun menjadi sebesar 2,61 atau masuk kategori "Baik". Capaian ini memang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya sebesar 2,76, namun masih lebih tinggi dibanding rata-rata Indeks SPBE Nasional sebesar 2,35. Berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2022 oleh Kementerian PAN dan RB, dari 4 domain penilaian SPBE (Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Layanan SPBE), domain Manajemen SPBE memiliki nilai yang terendah. Domain ini terdiri dari aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Audit TIK, termasuk Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data. Ke depan, aspek-aspek inilah yang perlu diperkuat kinerjanya, terlebih dengan kebijakan satu data, maka Manajemen Data SPBE menjadi penting karena menentukan kualitas pengelolaan data sehingga dapat diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Tahun 2023, berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2023, capaian naik secara sangat signifikan, dimana skor Indeks SPBE Kabupaten Blitar menjadi 3,63 poin, yang mana angka ini mampu mencapai target kinerja nilai Indeks SPBE sebesar 3,00 poin atau target kinerja IKU daerah tercapai kinerja sebesar 121% di

tahun 2023. Kenaikan skor nilai Indeks SPBE ini diikuti dengan kenaikan skor komponen/variabel Indeks SPBE, yaitu indeks Tata Kelola SPBE sebesar 3,60 poin dan nilai layanan SPBE sebesar 4,07 poin.

Identifikasi permasalahan yang masih terjadi pada tahun 2023 ada 4 hal, yaitu *pertama*, belum optimalnya capaian Indeks SPBE khususnya untuk komponen/variabel indeks Tata Kelola SPBE dan nilai layanan SPBE; *kedua*, cakupan wilayah/ruang publik terkoneksi internet masih perlu diperluas, sebagai bagian dari upaya untuk penguatan program *smart city*; *ketiga*, peningkatan kualitas sistem jaringan untuk meningkatkan kecepatan akses dan layanan publik oleh perangkat daerah dan *keempat*, peningkatan kualitas nilai keterbukan informasi publik daerah.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan hasil analisis evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian kinerja pelayanan Dinas Kominfo sebagaimana ditampilkan pada tabel 2 dan tabel 3 maka yang menjadi isu utama dalam pencapaian kinerja Dinas Kominfo adalah adanya perubahan indikator pada RPJMD baru sehingga mempengaruhi perubahan IKU dinas menjadikan prioritas kinerja OPD berubah. Kurang selarasnya indikator untuk tiap dokumen sehingga mempengaruhi capaian kinerja dan juga kurangnya review dan monitoring terhadap adanya aturan-aturan baru yang mempengaruhi perubahan-perubahan target dan capaian kinerja dinas. Selain itu, adanya perubahan paramater indikator penilaian terhadap Nilai Tata Kelola SPBE dan Nilai Layanan SPBE dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, berupa tambahan dan perubahan bobot indikator, sehingga berdampak terhadap capaian nilai Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten/Kota mengalami capaian penurunan.

Dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melalui program dan kegiatannya khususnya program kegiatan strategis dari tahun ketahun berupaya dengan maksimal untuk melakukan tupoksinya demi tercapainya sasaran strategis yang telah ditentukan. Dinas Kominfo tetap melakukan koordinasi dan sinergi program/kegiatan dengan pemerintah pusat (kementerian/lembaga) serta pemerintah kabupaten/kota khususnya dibidang peningkatan kualitas Pengoptimalan kinerja pemerintah

yang akuntabel, inovatif dan berintegritas agar sesuai dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku Untuk mencapai target. Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan oleh Dinas Kominfo antara lain :

1. Melakukan koordinasi dalam hal gerakan optimalisasi pelayanan publik perlu dimaksimalkan baik secara vertikal dan horizontal dilingkungan pemerintah daerah kabupaten blitar;
2. Tuntutan pelayanan berbasis digital dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, akurat, dan efisien perlu perbaikan sistem di aplikasi teknologi komunikasi yang dapat memproses dan memberikan pelayanan kepada semua lapisan masyarakat secara lebih luas diseluruh pemerintahan kabupaten Blitar;
3. Memperkuat jaringan komunikasi internet diseluruh wilayah kabupaten Blitar agar tercapainya target layanan Dinas Kominfo;
4. Peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia aparatur khususnya dalam bidang keamanan informasi seiring dengan makin maraknya aksi kejahatan *cyber* untuk mengambil berbagai data-data kegiatan pemerintahan.
5. Dalam situasi yang mulai membaiknya kondisi pasca pandemi covid 19 dan mulai menggeliatnya ekonomi di tahun 2022, diharapkan kualitas layanan Dinas Kominfo semakin baik karena menjadi bisa lebih optimal dalam melayani masyarakat.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah daerah dituntut untuk semakin meningkatkan kualitas sumber daya aparturnya yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan daerah lainnya. Teknologi saat ini telah memudahkan informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh penggunanya. Memudahkan pertukaran informasi melalui dunia maya. Penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance dan clean governance telah menciptakan perubahan-perubahan penting dalam praktek pemerintahan baik pusat maupun daerah. Perubahan tersebut diantaranya melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, transparansi dan akuntabilitas dalam publikasi pembangunan daerah. Maka dari itu, pemerintah daerah dituntut segera menyesuaikan program dan kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan

masyarakat dan peningkatan pembangunan disegala bidang. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kominfo Kab Blitar terdapat hambatan dan kendala yang dihadapi, antara lain :

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan informasi belum optimal disebabkan karena terbatasnya sarana dan prasarana dan anggaran operasionalnya.
2. Jumlah personil dan sumber daya aparatur yang belum sebanding dengan beban kerja dan luasnya wilayah yang ditangani.
3. Masih terdapat masyarakat yang belum mendapat akses internet.
4. Masih terdapat masyarakat yang belum melek digital literasi.
5. Infrastruktur digital masih belum tersebar luas dengan kualitas yang cukup.
6. Keterbatasan jumlah SDM aparatur dalam bidang Teknologi Informasi di khususnya untuk mengelola infrastruktur jaringan TI dan menangkal berbagai potensi serangan kejahatan dunia maya (cyber crime).
7. Perkembangan dunia TIK yang sangat cepat dan massif, berdampak pada tingkat kemampuan kompetensi SDM aparatur bidang TIK yang harus diupdate.
8. Kurangnya kesadaran dari aparatur untuk lebih mandiri dalam memahami peraturan-peraturan perundangan dan mengemban tugas dan tanggungjawabnya masing-masing dalam optimalisasi pelayanan.

Dampak dari kendala tersebut dapat menghambat/mempengaruhi proses pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat melalui program-program strategis yang telah tertuang dalam visi dan misi kepala daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, antara lain:

- a. Memaksimalkan sumber daya aparatur yang tersedia dengan meningkatkan kemampuan dan kinerja melalui kegiatan-kegiatan bimtek, diklat, kursus atau sejenisnya.
- b. Melakukan koordinasi dengan SKPD dan pihak terkait dalam rangka mengatasi permasalahan layanan publik berbasis elektronik di daerah.

- c. Melakukan sinergitas program dan kegiatan dengan rencana pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah.
- d. Membuat kebijakan terkait dengan pelayanan publik dan daerah serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan OPD lain melalui digital literasi.
- e. Peningkatan kesadaran apartur dalam tugas dan fungsinya sebagai pelayanan publik sehingga sesuai dengan standar dan prosedur kerja yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan masing-masing.

Dari beberapa kegiatan yang dilakukan juga mendukung SDG's. Analisis yang dilakukan telah berkontribusi guna mencapai indikator SDG's goal 9 yaitu industri, inovasi dan infrastruktur.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian kinerja pelayanan Dinas Kominfo sebagaimana ditampilkan pada tabel 2 dan tabel 3 maka yang menjadi isu utama dalam pencapaian kinerja Dinas Kominfo adalah adanya perubahan indikator pada RPJMD baru sehingga mempengaruhi perubahan IKU dinas menjadikan prioritas kinerja OPD berubah. Kurang selarasnya indikator untuk tiap dokumen sehingga mempengaruhi capaian kinerja dan juga kurangnya review dan monitoring terhadap adanya aturan-aturan baru yang mempengaruhi perubahan-perubahan target dan capaian kinerja dinas.

Dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika melalui program dan kegiatannya khususnya program kegiatan strategis dari tahun ketahun berupaya dengan maksimal untuk melakukan tupoksinya demi tercapainya sasaran strategis yang telah ditentukan. Dinas Kominfo tetap melakukan koordinasi dan sinergi program/kegiatan dengan pemerintah pusat (kementerian/lembaga) serta pemerintah kabupaten/kota khususnya dibidang peningkatan kualitas Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas agar sesuai dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku Untuk mencapai target. Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan oleh Dinas Kominfo antara lain :

1. Melakukan koordinasi dalam hal gerakan optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi TIK perlu dimaksimalkan baik secara vertikal dan horizontal dilingkungan pemerintah daerah kabupaten blitar;
2. Tuntutan pelayanan berbasis digital dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, akurat, pasti, dan efisien perlu perbaikan sistem di aplikasi teknologi komunikasi yang dapat memproses dan memberikan pelayanan kepada semua lapisan masyarakat secara lebih luas diseluruh pemerintahan kabupaten Blitar;
3. Memperkuat jaringan komunikasi internet di seluruh wilayah kabupaten Blitar agar tercapainya target layanan Dinas Kominfo;
4. Dalam situasi yang mulai membaiknya kondisi pasca pandemi covid 19 dan mulai stabilnya pertumbuhan ekonomi di tahun 2024, diharapkan kualitas layanan Dinas Kominfo semakin baik karena menjadi bisa lebih optimal dalam melayani masyarakat.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah daerah dituntut untuk semakin meningkatkan kualitas sumber daya aparaturnya yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan daerah lainnya. Teknologi saat ini telah memudahkan informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh penggunanya. Memudahkan pertukaran informasi melalui dunia maya. Penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* dan *clean governance* telah menciptakan perubahan-perubahan penting dalam praktek pemerintahan baik pusat maupun daerah. Perubahan tersebut diantaranya melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, transparansi dan akuntabilitas dalam publikasi pembangunan daerah.

Maka dari itu, pemerintah daerah dituntut segera menyesuaikan program dan kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pembangunan disegala bidang. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kominfo Kab Blitar terdapat hambatan dan kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan informasi belum optimal disebabkan karena terbatasnya sarana dan prasarana dan anggaran operasionalnya.
2. Jumlah personil dan sumber daya aparatur yang belum sebanding dengan beban kerja dan luasnya wilayah yang ditangani.
3. Masih terdapat masyarakat yang belum mendapat akses internet.
4. Masih terdapat masyarakat yang belum melek digital literasi.
5. Infrastruktur digital masih belum tersebar luas dengan kualitas yang cukup.

6. Kurangnya kesadaran dari aparaturnya untuk lebih mandiri dalam memahami peraturan-peraturan perundangan dan mengemban tugas dan tanggungjawabnya masing-masing dalam optimalisasi pelayanan.

Dampak dari kendala tersebut dapat menghambat/mempengaruhi proses pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat melalui program-program strategis yang telah tertuang dalam visi dan misi kepala daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, antara lain:

- a. a. Memaksimalkan sumber daya aparaturnya yang tersedia dengan meningkatkan kemampuan dan kinerja melalui kegiatan-kegiatan bimtek, diklat, kursus atau sejenisnya.
- b. Melakukan koordinasi dengan SKPD dan pihak terkait dalam rangka mengatasi permasalahan layanan publik berbasis elektronik di daerah.
- c. Melakukan sinergitas program dan kegiatan dengan rencana pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah.
- d. Membuat kebijakan terkait dengan pelayanan publik dan daerah serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan OPD lain melalui digital literasi.
- e. Peningkatan kesadaran aparaturnya dalam tugas dan fungsinya sebagai pelayanan publik sehingga sesuai dengan standar dan prosedur kerja yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan masing-masing.

Dari beberapa kegiatan yang dilakukan juga mendukung SDG's. Analisis yang dilakukan telah berkontribusi guna mencapai indikator SDG's goal 9 yaitu industri, inovasi dan infrastruktur. Inovasi yang didukung adalah inovasi untuk peningkatan layanan publik berbasis TIK, menuju layanan yang efektif, efisien, pasti dan akuntabel. Sehingga, mendorong kemudahan proses administrasi investasi atau *easy doing business*

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Visi:

Sebagaimana diketahui bahwa dengan ditetapkan dokumen RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, maka visi Kabupaten Blitar adalah:

*“TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA
BERLANDASKAN AKHLAK MULIA (BALDATUN, THOYYIBATUN,
WA ROBBUN GHOFUUR)”*

Misi:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya.
2. Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi, dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar.
3. Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas
4. Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan

Tujuan:

5. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial kehidupan masyarakat
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berpersepektif gender .
7. Mewujudkan pemerintahan daerah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas
8. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi inklusif dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Sasaran :

1. Menurunnya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial
2. Terwujudnya penghayatan dan penerapan nilai-nilai religius, toleransi solidaritas sosial, dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat.
3. Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan.
4. Meningkatnya Kualitas Kepemudaan
5. Meningkatkan Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Publik Hingga Ke Desa.

6. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
7. Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat.
8. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan.
9. Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Dalam hal perbandingan dengan rumusan awal RKPD, Renja Dinas Kominfo Kabupaten Blitar Tahun 2025 mengalami perubahan. yaitu semua Sub Kegiatan mengalami penyesuaian indikator sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021. Berdasarkan hasil penyesuaian indikator, evaluasi renja dan evaluasi kinerja serta analisis kebutuhan, maka perlu dilakukan beberapa perubahan baik dalam penetapan target, maupun pendanaan menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan daerah. Beberapa perubahan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perubahan Indikator

Sub Kegiatan mengalami penyesuaian indikator sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021.

2. Perubahan Target

Beberapa target kinerja diubah disesuaikan dengan kondisi akhir (capaian kinerja) Tahun 2023 dan capaian kinerja semester I tahun 2024 sebagaimana dilaporkan dalam Evaluasi Renja dan penyesuaian indikator juga menyesuaikan beberapa target yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Perubahan Kebutuhan Dana

Kebutuhan Dana lebih disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kegiatan

4. Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas

Pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 telah ditetapkan beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Dinas Kominfo sesuai dengan surat edaran.

Review terhadap Rencana Kerja RKPD Tahun 2025 terhadap hasil analisis kebutuhan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar dapat dilihat pada tabel 4 terlampir:

Table 4 Reviu Rencana Kerja RKPD 2025 Dinas Kominfo

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah	92%	5.288.084.121	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah	92%	5.288.084.121	
	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	92%	46.884.500	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Persentase dokumen	92%	46.884.500	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat	92%	3.355.050.019	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat	92%	3.355.050.019	

			waktu dan akuntabel					Daerah yang tepat waktu dan akuntabel			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	92%	172.188.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	92%	172.188.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	92%	381.310.579	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	92%	381.310.579	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Blitar	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	92%	187.585.449	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Blitar	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	92%	187.585.449	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Blitar	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	92%	839.422.424	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Blitar	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	92%	839.422.424	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Blitar	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	92%	305.623.150	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Blitar	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	92%	305.623.150	
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Kab. Blitar	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses informasi (hasil survey KIM)	86%	2.224.975.144	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Kab. Blitar	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses informasi (hasil survey KIM)	86%	2.224.975.144	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan STRAKOM	60%	2.224.975.144	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan STRAKOM	60%	2.224.975.144	
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Kab. Blitar	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat Daerah yang Terlayani Infrastruktur TIK	50% 100%	4.216.137.450	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Kab. Blitar	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat Daerah yang Terlayani	50% 100%	4.216.137.450	

								Infrastruktur TIK			
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	3.279.539.050	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	3.279.539.050	
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Jumlah regulasi/kebijakan TIK terkait implementasi e-government	20 kebijakan	936.598.400	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Jumlah regulasi/kebijakan TIK terkait implementasi e-government	20 kebijakan	936.598.400	
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kab. Blitar	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	70 %	800.000.000	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kab. Blitar	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	70 %	800.000.000	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kab. Blitar	Jumlah PD yang	52 PD	800.000.000	Penyelenggaraan Statistik	Kab. Blitar	Jumlah PD yang	52 PD	800.000.000	

	di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah			Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah			
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Kab. Blitar	Jumlah Sistem Elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi SMKI dan atau persandian Persentase Tingkat Kemanan Informasi Pemerintah	100%	323.919.450	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Kab. Blitar	Jumlah Sistem Elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi SMKI dan atau persandian Persentase Tingkat Kemanan Informasi Pemerintah	100%	323.919.450	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Kab. Blitar	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip aplikasi persandian	70%	323.919.450	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Kab. Blitar	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip aplikasi persandian	70%	323.919.450	

					323.919.450							
--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi urusan wajib bukan pelayanan dasar pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika sehingga Dinas Kominfo melakukan tugas koordinatif sesuai dengan kewenangannya dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian daerah yaitu membantu Bupati dalam penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan pelayanan publik daerah yang ada di Wilayah Kabupaten Blitar Membuat kebijakan terkait pelayanan informasi pembangunan daerah serta melakukan sosialisasi teknologi informasi kepada masyarakat.

Table 5 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Kab Blitar	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat Daerah yang Terlayani Infrastruktur TIK		Total anggaran Rp 464.500.000
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang disediakan oleh Dinas	2 usulan Musrenbang	

			Kominfo		
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab Blitar	Jumlah regulasi/kebijakan TIK terkait implementasi e-government	10 usulan Musrenbang dan 1 usulan Pokir DPRD	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab Blitar	Jumlah Workshop TIK		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Nasional periode 2025-2025 memiliki visi ***“Negara yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur”***, yang dijabarkan ke dalam 8 (delapan) misi/agenda pembangunan yang secara ringkas dijelaskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing.
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi, dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan.
3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketanggungan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketanggungan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transfromasu supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.

7. Dukungan sarana dan prasarana berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.
8. Kestinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pendanaan pembangunan.

Untuk tema RKPD Provinsi Tahun 2025 adalah ***"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan berkelanjutan"***. Tema pada Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Timur ini selaras dengan arah pembangunan RPD tahun 2025-2026 dan masih bersifat sementara, menunggu tema perencanaan pembangunan RKP dari pusat untuk dilakukan penyelarasan lebih lanjut. Demikian juga, terkait dengan tema RKPD Provinsi Jawa Timur ini selaras dengan tema pokok pembangunan nasional, yaitu transformasi ekonomi dan sumber daya manusia. RKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini terbagi ke dalam 9 prioritas pembangunan, yaitu:

1. Prioritas 1: Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial.
2. Prioritas 2: Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun ekonomi unggulan.
3. Prioritas 3: Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor pendidikan dan kesehatan.
4. Prioritas 4: Pembangunan infrastruktur pengembangan wilayah terpadu dan berkeadilan.
5. Prioritas 5: Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis Nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas.
6. Prioritas 6: Pembangunan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan dan Perkebunan berbasis Kerakyatan.
7. Prioritas 7: Pembangunan ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, BUM Desa, dan mendorong pemberdayaan Pemerintahan Desa.
8. Prioritas 8: Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan Anti Korupsi.
9. Prioritas 9: Menjaga harmoni sosial dan alam dengan melestarikan kebudayaan dan lingkungan hidup.

Berdasarkan arahan sasaran pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur, maka tema pembangunan daerah Kabupaten Blitar yang ditetapkan adalah **"Penguatan SDM Unggul dan Ekosistem Ekonomi Lokal untuk Kemandirian Ekonomi Daerah"**. Tema ini selaras dalam mendukung sasaran pembangunan nasional dan pemerintah Provinsi Jawa Timur, melalui beberapa prioritas pembangunan, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan;
2. Meningkatkan Kapasitas SDM Pelaku Ekonomi dan Penguatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang;
4. Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik; dan
5. Pemantapan Infrastruktur Ekonomi serta Daya Dukung Lingkungan Hidup.

Keselarasan Prioritas Pembangunan RKP, RKPD Provinsi Jawa Timur,



Sumber : RKPD Kabupaten Blitar, 2025.

Dinas Kominfo sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, serta statistik dan persandian, secara langsung turut melaksanakan mendorong pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dinas Kominfo yang mengampu 3 urusan, mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional ke-2 yaitu mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi, dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi

ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan. Sedangkan, untuk pencapaian sasaran pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung prioritas pembangunan ke-8 yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan Anti Korupsi. Pada pencapaian sasaran tema pembangunan Pemerintah Kabupaten Blitar pada prioritas ke-4 yaitu penguatan *e-government* dan pelayanan publik. Salah satu strategi untuk mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan daerah tersebut, maka Dinas Kominfo wajib melakukan penyusunan rencana program dan kegiatan untuk memperoleh sinkronisasi pencapaian sasaran dan efektifitas luaran melalui penyusunan RKPD yang selaras dengan RKP, dan memastikan OPD dalam menyusun Renja juga selaras dengan dokumen di atasnya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Dinas Kominfo yang didasarkan rumusan isu –isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Tujuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan dengan pengoptimalan penerapan SPBE dalam pelayanan publik yang terintegrasi. Tujuan ini kemudian dijabarkan ke dalam satu sasaran yaitu meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE. Rencana Kerja Dinas Kominfo didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi aparatur Dinas Kominfo yang profesional dan kredibel melalui literasi digital.
2. Meningkatkan pelayanan publik berbasis *e-government*.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang sesuai standar SPBE dan akuntabel.
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Berkaitan dengan dengan tujuan dan sasaran tersebut, maka Dinas Kominfo sebagai salah satu OPD di lingkup Kabupaten Blitar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk merumuskan melaksanakan kebijakan dalam pengelolaan komunikasi dan informasi publik, penyelenggaraan E-government, statistika sektoral dan persandian

memilik peran penting dalam terwujudnya meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan penerapan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kominfo sesuai tercantum dalam dokumen renstra 2021-2026 adalah Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan dengan pengoptimalan Penerapan SPBE dalam pelayanan publik yang terintegrasi. Selanjutnya tujuan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam sasaran yang diukur dengan indikator Persentase layanan publik yang sesuai dengan standar SPBE.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah dan menunjang pencapaian tema RKPD 2025 yaitu adalah Penguatan SDM Unggul dan Ekosistem Ekonomi Lokal untuk Kemandirian Ekonomi Daerah serta terkait dengan prioritas pembangunan RKPD ke 4 yaitu Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik.

Table 6 Persentase Capaian IKU Dinas Kominfo

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian tahun 2023	Target Tahun 2025
	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan dengan pengoptimalan penerapan SPBE dalam pelayanan publik yang terintegrasi	Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE	Nilai Tata Kelola SPBE	3,60	4,30
			Nilai Layanan SPBE	4,07	4,32

Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, dilakukan melalui penetapan strategi dan arah kebijakan tahun 2025, yaitu:

1. Strategi-1: Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan:

- Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada ruang publik;
 - Meningkatkan pembangunan aplikasi sesuai standart SPBE untuk mewujudkan *e-government* terintegrasi;
 - Meningkatkan pengetahuan pengelolaan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi Aparatur;
 - Meningkatkan Sarana dan Prasarana untuk mendukung *e-government*
2. Strategi-2: Peningkatan Komunikasi Publik, yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan:
- Meningkatkan pengelolaan kehumasan dan pelayanan informasi penangkalan berita hoax;
 - Meningkatkan Literasi Digital kepada Masyarakat;
 - Meningkatkan pengelolaan keluhan dan aduan masyarakat.
3. Strategi-3: Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Statistik, yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan:
- Meningkatkan Pengelolaan Media Informasi Pemerintah;
 - Mengoptimalkan Penerapan Manajemen Komunikasi Pemerintah di Era Digital;
 - Meningkatkan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah melalui Berbagai Media;
 - Meningkatkan Kerjasama dengan BPS dalam Penerbitan Produk Data Statistik;
 - Membangun Data Center yang baik dan Terintegrasi;
 - Meningkatkan Pembinaan dan Penguatan Regulasi terkait Pemanfaatan Data seluruh Perangkat Daerah.
4. Strategi-4: Peningkatan Pelayanan Parsandian, yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan:
- Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Persandian dan Telekomunikasi;
 - Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika;
 - Meningkatkan Pemerataan Pengetahuan dan Literasi terkait Keamanan Sistem Informasi yang Berpedoman pada Indeks Kemanan Informasi.

3.3 Program dan Kegiatan

Pada tahun anggaran 2025 Dinas Kominfo Kabupaten Blitar merencanakan akan melaksanakan sebanyak 5 Program dan 12 kegiatan didukung oleh 31 sub kegiatan, yaitu:

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Adapun Indikator Kinerja Kegiatan ini adalah jumlah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor disediakan 10 paket
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 14 paket.
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 paket.
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 6 paket
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan: 1 dokumen
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 1 laporan
2. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Adapun Indikator Kinerja Kegiatan ini adalah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran 14 unit.
3. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 27 orang.

- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. Adapun indikatornya adalah Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 dokumen.
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Adapun indikatornya adalah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 7 laporan
4. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Adapun output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen yang disusun, ditargetkan sebanyak 3 dokumen, Renstra, Renja, Renja-P
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Adapun output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen yang disusun, ditargetkan sebanyak 5 dokumen, yaitu LKjIP, Laporan Capaian Kinerja, Tribulan, Renaksi Evaluasi, LPPD, LKPJ.
5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi, Adapun indikatornya adalah Jumlah Pegawai.
 - b. Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Adapun indikatornya adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 laporan
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Adapun indikatornya adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 laporan
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Adapun indikatornya adalah Jumlah Laporan

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
1 laporan

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
Adapun indikatornya adalah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 15 unit.
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
Adapun indikatornya adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten.

- a. Pengelolaan Media Komunikasi. Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik 2 dokumen.
- b. Pelayanan Informasi Publik. Adapun output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik 1 dokumen.
- c. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik. Adapun keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi 2 dokumen.

Program Aplikasi Informatika

- a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten.
 1. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Adapun indikatornya adalah Badan, Dinas, Kecamatan,

Kelurahan, Puskesmas, Balai Penyuluh Pertanian, Laboratorium, Pasar, Pelayanan Publik, Area Publik (154 titik);

- b. Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten.
 1. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik Adapun indikatornya adalah jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan 52 unit
 2. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah. Adapun indikatornya adalah 1 dokumen
 3. Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten cerdas. Adapun indikatornya adalah jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan smartcity 1 dokumen.
 4. Monitoring evaluasi dan pelaporan pengembangan Ekosistem SPBE. Adapun indikatornya adalah dokumen monitoring , evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan SPBE 1 dokumen
 5. Pengelolaan pusat data pemerintah daerah. Adapun indikatornya adalah pusat data pemerintah daerah yang dikelola 1 unit

Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten.
 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral. Adapun indikatornya adalah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 4 dokumen.
 2. Membangun Meta data Statistik Sektoral. Adapun indikatornya adalah Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun 1 dokumen

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik adapun indikatornya adalah 1 laporan..

Table 7 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kominfo Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Blitar	92 %	5.288.084.121	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		93 %	4.077.570.704
	<i>Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Kab. Blitar	92 %	46.884.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		92 %	5.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	Kab. Blitar	3 dokumen	20.791.600	Dana Transfer		3 dokumen	2.000.000

		Perencanaan perangkat daerah yang disusun				Umum-Dana Alokasi Umum			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Blitar	4 laporan	26.092.900			4 laporan	3.000.000
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel	Kab. Blitar	92%	3.355.050.019	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		92 %	2.927.841.214
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Blitar	27 orang/bulan	3.308.549.165	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		27 Orang/bulan	2.896.041.214
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Blitar	1 dokumen	41.140.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	30.000.000

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Blitar	7 laporan	5.360.854,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 laporan	1,800,000
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Blitar	92%	172.188.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		92 %	278.781.745
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Blitar	0 orang	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 orang	278.781.745

	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	Kab. Blitar	92%	381.310.579	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		92 %	278.781.745
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Blitar	10 paket	4.792.425	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 paket	10.525.800
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Blitar	14 paket	23.671.084	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 paket	99.386.095
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Blitar	6 paket	142.623.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 paket	64.150.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	Kab. Blitar	6 paket	22.551.070	Dana Transfer Umum-Dana		6 paket	24.720.850

		Penggandaan yang Disediakan				Alokasi Umum			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Blitar	1 dookumen	1.750.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 dokumen	1.500.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Blitar	1 laporan	185.923.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 laporan	78.499.000
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	Kab. Blitar	92 %	187.585.449	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		92 %	250.500.345
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	Kab. Blitar	14 unit	187.585.449	Dana Transfer Umum- Dana		14 unit	250.500.345

		Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				Alokasi Umum			
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Permerintah Daerah</i>	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	Kab. Blitar	92%	839.442.424	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		92 %	198.042.100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Blitar	1 laporan	4.470.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 laporan	4.600.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Blitar	1 laporan	6.550.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 laporan	7.000.000

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Blitar	1 laporan	828.422.424	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	138.623.555
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Kab. Blitar	92 %	305.623.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		92%	138.623.555
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, kaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Blitar	15 unit	128.910.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 unit	90.623.555
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Kab. Blitar	1 unit	176.713.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	48,000,000

		Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap akses informasi (Hasil Survey IKM)	Kab. Blitar	86%	2.224.975.144			86%	4.239.511.449
	<i>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan STRAKOM	Kab. Blitar	60%	2.224.975.144	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		60 %	4.239.511.449
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kab. Blitar	2 dokumen	369.379.977	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen	738.723.449
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	Kab. Blitar	1 dokumen	1.588.182.967	Dana Transfer Umum-Dana		1 dokumen	3.300.788.000

		Pengelolaan Media Komunikasi Publik				Alokasi Umum			
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Kab. Blitar	1 dokumen	267.412.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	200.000.000
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat Daerah yang Terlayani Infrastruktur TIK	Kab. Blitar	50 persen 100 persen	4.216.137.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 persen 100 persen	1.349.826.796
	<i>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses	Kab. Blitar	100%	3.279.539.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	0

		internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo							
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemenntah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Blitar					154 unit	0
	<i>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah regulasi/kebijakan TIK terkait implementasi e-government	Kab. Blitar	154 unit	936.598.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 kebijakan	1.349.826.796
	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Kab. Blitar	52 Aplikasi	15.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	123.800.200
	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Kab. Blitar	1 laporan	79.197.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		52 unit	120.813.072
	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubung	Kab. Blitar	1 dokumen	49.000.000	Dana Transfer		1 dokumen	95.000.000

		an pusat kendali dengan Pusat Data Nasional				Umum-Dana Alokasi Umum			
	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE</i>	Kab. Blitar	1 dokumen	148.601.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	89.000.000
	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Kab. Blitar	31 Aplikasi	398.260.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		31 Aplikasi	391.907.927
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kab. Blitar	3 Aplikasi	13.600.000			3 Aplikasi	120.000.000

	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	Kab. Blitar	52 Unit	205.140.000			52 Unit	120.000.000
	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Kab. Blitar	1 Layanan	13.600.000			1 layanan	120.000.000
	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	Kab. Blitar	1 Program	13.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 program	144.661.446

	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Kab. Blitar	70%	800.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		70%	1.500.000.000
	<i>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Kab. Blitar	52 OPD	800.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		52 OPD	1.500.000.000
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Kab. Blitar	54 orang	149.874.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4 dokumen	300.000.000

	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Kab. Blitar	100 %	40.899.600				300.000.000
	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Kab. Blitar	60%	99.958.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			300.000.000
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Kab. Blitar	15 Dokumen	456.162.000,	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			300.000.000
	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina	Kab. Blitar	30 dokumen	53.106.400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		30 dokumen	300.000.000

		Data Statistik							
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Tingkat Kemanan Informasi Pemerintah	Kab. Blitar	100%	323.919.450	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	17.385.851
	<i>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota</i>	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip aplikasi persandian	Kab. Blitar	85%	323.919.450	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		70%	17.385.851
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Blitar	1 laporan	323.919.450	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 laporan	17.385.851

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang daerah dibidang Komunikasi dan Informatika, Dinas Kominfo Kabupaten Blitar mengampu dua urusan pemerintahan daerah yaitu dan Informatika, Statistik dan Persandian. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renja Tahun 2025, maka Dinas Kominfo Kabupaten Blitar pada tahun 2025 merencanakan Program, kegiatan, dan sub kegiatan sebanyak 5 program, 12 kegiatan, dan 31 sub kegiatan yang seluruhnya bersumber dari dana APBD senilai Rp. **12.853.116.165,-**.

Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kominfo Tahun 2025 diatas, maka diperlukan langkah-langkah yang strategis yang dijabarkan dalam Rencana Aksi dan pagu indikatif tiap kegiatan prioritas sebagai berikut:

Table 8 Rencana Aksi dan Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Prioritas
Dinas Kominfo Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas 2022	Rencana Aksi	Pagu Indikatif Kegiatan (Rp.)	Keterangan
1	Program Informasi dan Komunikasi Publik		2.224.975.144	
	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik		267.412.200	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		369.379.977	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		1.588.182.967	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		4.216.137.450	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		3.279.539.050	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan		3.279.539.050	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas 2022	Rencana Aksi	Pagu Indikatif Kegiatan (Rp.)	Keterangan
	Pengelolaan Nama Domain			
	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		936.598.400	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Sub Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional		15.600.000	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda		79.197.200	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah		49.000.000	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE		148.601.200	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah		398.260.000	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		13.600.000	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas		205.140.000	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Sub Kegiatan Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang Terintegrasi		13.600.000	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Sub Kegiatan Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas		13.600.000	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		800.000.000	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		800.000.000	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas 2022	Rencana Aksi	Pagu Indikatif Kegiatan (Rp.)	Keterangan
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		149.874.000	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional		40.899.600	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral		99.958.000	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data		456.162.000	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Sub kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar		53.106.400	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
4	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		323.919.450	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota		323.919.450	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.		323.919.450	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah

BAB V **PENUTUP**

Seiring makin stabil dan mantapnya perkembangan ekonomi daerah dan dinamika sosial daerah Kabupaten Blitar, pasca covid-19, maka Pemerintah Daerah makin agresif dalam melakukan program dan kegiatan yang berdampak pada makin berkembangnya kesejahteraan masyarakat. Dinas Kominfo memiliki peran yang sangat strategis dalam peningkatan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam bidang peningkatan pelayanan publik berbasis TIK. Implementasi TIK memberikan jaminan efektifitas, kepastian dan efisiensi pelayanan publik yang pada akhirnya mampu meningkatkan kinerja ekonomi daerah.

Penerapan e-government yang semakin massif di dalam tata kelola pemerintahan mendorong kebutuhan perlunya dukungan kapasitas dan jaringan infrastruktur TIK yang semakin baik. Dalam situasi ini yang tidak boleh terlupakan adalah keberlanjutan usaha pemerintah daerah untuk mewujudkan good governance melalui SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Dimana poin ini menjadi fokus utama dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dalam rangka audit kinerja tahun 2024. Melalui e-government ini pula diharapkan bahwa pelayanan publik dapat menjadi maksimal, efektif, dan efisien.

Dalam pelaksanaan penyusunan rencana kerja Dinas Kominfo di tahun 2025 ini tentu mendapati berbagai hambatan dan tantangan selain terkait perubahan eksternal, perubahan kebijakan dari pusat, terbatasnya SDM , antara lain bahwa saat ini kompetensi aparatur Diskominfo masih kurang sesuai standar, sehingga didalam internal Dinas Kominfo sendiri akan melakukan bimtek terkait teknologi sehingga semua aparatur akan memiliki kompetensi yang sama dan sesuai standar. Serta isu lain yang sekiranya dapat mempengaruhi kinerja Dinas Kominfo, sudah sepatutnya Dinas Kominfo peka dan cepat tanggap terhadap perubahan-perubahan. Melalui penyusunan rencana kerja Dinas Kominfo tahun 2023 ini diharapkan bahwa tujuan Perangkat Daerah yaitu meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan dengan pengoptimalan penerapan SPBE dalam pelayanan publik yang terintegrasi tetap dapat terwujud.

Selanjutnya jika di dalam perencanaan program dan kegiatan terdapat ketidaksesuaian baik dikarenakan situasi tertentu sehingga menyebabkan dilakukannya perubahan struktural ataupun perubahan lainnya termasuk realokasi/refocusing anggaran maka Dinas Komunikasi dan Informatika tetap

berkomitmen untuk memaksimalkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah direncanakan.

Kaidah-kaidah :

Dalam pelaksanaan rencana kerja tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Optimalisasi sumber daya yang tersedia;
1. Memperhatikan evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya;
2. Permasalahan yang ada dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
3. Tujuan yang ingin dicapai;
4. Kebijakan, sasaran dan prioritas perangkat daerah untuk mencapai tujuan;
5. Prioritas tema pembangunan pemerintah saat ini untuk menjaga kesinambungan dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

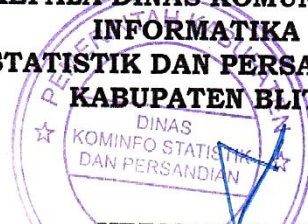
Rencana Tindak Lanjut :

Selanjutnya dalam rangka tindak lanjut daripada rencana kerja tahun 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika, pencapaian pelaksanaan target yang direncanakan dalam realisasinya tentunya ada yang tidak sesuai target atau di sisi lain melebihi target yang telah direncanakan. Untuk itu diperlukan evaluasi target kinerja dan anggaran untuk menentukan rencana tindak lanjut sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan pada tahun yang akan datang agar terlaksana sesuai target.

Sebagai penutup apabila terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, maka kedepannya diharapkan untuk lebih intens dalam peningkatan kualitas perencanaan sehingga perangkat daerah mampu untuk mencapai target kinerja program maupun kegiatan dan memiliki kualitas indikator kinerja yang jauh lebih baik dan smart.

Blitar, September 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BLITAR**



HERMAN WIDODO, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650916 199112 001